

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang *e-government* untuk mengukur kesenjangan digital telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Chalita Srinuan (2012) melakukan penelitian pengukuran antar kelompok masyarakat dan antar negara-negara di Thailand. Model yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah *econometric* untuk mengukur kesenjangan digital di Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor permintaan yang biasanya ditemukan di Amerika Serikat dan Uni Eropa terlihat juga di Thailand. Kesenjangan digital di Thailand dibentuk oleh interaksi antara faktor dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Kedua faktor tersebut diperlukan untuk mempromosikan keuntungan dalam pengadopsian internet dan untuk menjembatani kesenjangan digital (Srinuan, 2012).

Selain menggunakan metode *econometric*, pengukuran kesenjangan digital dapat dilakukan menggunakan metode yang digunakan pada masyarakat Eropa yaitu SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking The Information Society*). Penelitian yang menggunakan model SIBIS antara lain dilakukan oleh Alivia Yulfitri (2008). Penelitian ini mengambil obyek dunia pendidikan dengan studi kasus di SMU Negeri Kotamadya di Bandung. Penelitian ini dilakukan terhadap guru-guru di sekolah tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel ketersediaan fasilitas akses TIK

dengan pencapaian penguasaan TIK, ketersediaan fasilitas akses TIK dengan tingkat penguasaan TIK, serta ketersediaan fasilitas akses TIK dengan pemanfaatan TIK (Yulfitri, 2008) .

Metode SIBIS juga dipakai pada penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah (2013) di Kabupaten Tapanuli Selatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode SIBIS GPS (*General Population Survey*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan akses TIK berada pada kategori tinggi dan kesenjangan kemampuan TIK berada pada kategori sedang, sementara kondisi kesenjangan digital berdasarkan faktor kelompok usia, penghasilan, pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kesenjangan digital antar SDM, sementara jenis kelamin tidak cukup signifikan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesenjangan digital (Hidayatullah, 2013).

Penelitian kesenjangan digital di lingkungan pemerintahan daerah juga dilakukan oleh Ike Pertiwi Windasari dan Kridanto Surendro (2011). Penelitian dilakukan di lingkungan pemerintah daerah di Kota Semarang untuk pemerataan kemampuan TIK SDM dan digunakan untuk menutup kesenjangan kompetensi dalam pengembangan sistem *e-government* yaitu melakukan pelatihan pegawai dan perekrutan pegawai baru menggunakan instrumen SIBIS GPS.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi Pemerintah Kota Semarang saat ini memiliki hambatan dalam adopsi TIK dikarenakan

kurangnya pelatihan bagi para pegawainya, kesadaran bagi pegawai untuk mengikuti pelatihan masih rendah, dan pelatihan yang diadakan oleh organisasi masih dianggap kurang (Ike Pertiwi Windasari, 2011) .

Berdasarkan penelitian terdahulu maka penulis menganggap bahwa metode SIBIS merupakan metode yang paling tepat untuk mengukur kesenjangan digital pada masyarakat dengan menggunakan indikator-indikator yang terdapat didalamnya. Hasil studi literatur pada penelitian terdahulu belum ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang pengukuran kesenjangan digital masyarakat di Kabupaten Lembata.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian

No	Nama Peneliti	Obyek Penelitian	Metode yang digunakan	Hasil Penelitian
1	Ike Pertiwi Windasari dan Kridanto Surendro (2011)	Pemerintah Daerah Kota Semarang	Metode SIBIS dan DIDIX	Kurangnya pelatihan dan rendahnya pegawai dalam mengikuti pelatihan mengakibatkan adanya tingkat kesenjangan digital
2	Alivia Yulfitri (2008)	SMU Negeri Kotamadya di Bandung	Metode SIBIS GPS	Keterkaitan akses TIK, penguasaan TIK, dan pemanfaatan TIK yang menyebabkan kesenjangan digital.
3	Chalita Srinuan (2012)	Masyarakat dan antar negara-negara Thailand	Model Econometric	Faktor permintaan dan penawaran di Thailand yang membuat adanya tingkat kesenjangan digital. Kedua faktor tersebut menjembatani kesenjangan digital.
4	Syarif Hidayatullah (2013)	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Tapanuli Selatan	Metode SIBIS GPS	Kesenjangan digital semakin berkurang apabila pemerataan TIK perlu dievaluasi dari Aspek kesenjangan pengaksesan TIK, kemampuan TIK, serta demografi.
5	Dyah Listianing Tyas (2015)	Masyarakat Kota Pekalongan	Metode SIBIS GPS	Kesenjangan yang terjadi karena kurang adanya pemanfaatan TIK dan program pelatihan kepada masyarakat

6	Cecilia Dai Payon Binti Gabriel	Masyarakat Kabupaten Lembata	Metode SIBIS GPS	Kesenjangan digital di masyarakat Kabupaten Lembata dapat ditingkatkan dengan memberi pelatihan dan juga pemerataan akses serta kemampuan TIK bagi masyarakat
---	---------------------------------	------------------------------	------------------	---

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Kesenjangan Digital

Istilah kesenjangan digital menunjukkan kesenjangan antara individu, rumah tangga, perusahaan atau geografis daerah grafis yang ada di berbagai tingkat pembangunan sosial-ekonomi, yang dipantau melalui kemungkinan mereka untuk akses ke ICT, serta penggunaan Internet secara pribadi, sosial dan kegiatan usaha (OECD, 2001).

Pencapaian "*masyarakat informasi untuk semua*" menyajikan salah satu prioritas politik dari Euro pean Union, yang ditekankan dalam proyek Uni Eropa, dengan nama yang sama (Eropa Komisi, 2000, 2002). Prioritas politik ini menentukan menetapkan tujuan yang jelas untuk meminimalkan semua bentuk kesenjangan digital. Sebagai lawan kesenjangan digital, *partisipasi* syarat dan *inklusi* yang diperkenalkan. Dalam dokumen kerja tubuh Uni Eropa istilah ini digunakan ketika didenda tujuan seperti merancang masyarakat yang sah, dengan lingkungan sosial-ekonomi seperti yang semua warga negara, atau setidaknya mayoritas, akan dapat menikmati keuntungan dari masyarakat informasi (Komisi Eropa, 2001).

Kesenjangan digital menyajikan, fenomena sosial multidimensi yang kompleks yang melihat pada berbeda tingkat pemantauan dan yang menyebabkan

banyak konsekuensi pada masyarakat (Ekonomi dan Sosial Komisi untuk Asia Barat, 2005). Efeknya terlihat dalam konteks internasional, bila diukur antara negara-negara yang berbeda, serta dalam rangka nasional, dalam khususnya untuk para negara lain. Hal ini melihat melalui perbedaan mengenai ketersediaan infrastruktur TIK, cara penggunaannya dan kemungkinan menikmati keuntungan bahwa penggunaan ICT menyediakan. Digital membagi biasanya mengacu pada domain penduduk. Namun, hal ini juga memungkinkan untuk mengukur dan mengungkapkan kesenjangan digital antara badan usaha, menerapkan kriteria yang ditetapkan secara tepat dan mengukur model. Kesenjangan digital dapat dipantau dalam kaitannya dengan lingkungan suatu negara tertentu (digi-eksternal membagi) atau dapat dibatasi pada satu negara tertentu (digital divide internal).

Eksternal kesenjangan digital mengacu pada perbedaan dalam kemungkinan aplikasi ICT dan perbedaan cara penerapannya, yang dapat melihat ketika negara tertentu dibandingkan dengan lingkungannya dengan negara-negara lain, daerah, masyarakat dari negara atau unit geografis.

Kesenjangan digital internal dapat dipantau pada populasi dan badan usaha (perusahaan). Kesenjangan digital internal populasi dipelajari pada kelompok-kelompok sosial yang berbeda yang diklasifikasikan dari beberapa kriteria yang dipilih seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, usia dan lain sebagainya. Kesenjangan digital internal badan usaha dipelajari pada kelompok yang berbeda dari perusahaan, diklasifikasikan sesuai dengan kriteria yang relevan dipilih secara tepat.

Dengan demikian kesenjangan digital didefinisikan kesenjangan (gap) antara individu, rumah tangga, bisnis, (atau kelompok masyarakat) dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan penggunaan internet untuk beragam aktivitas. Di Indonesia banyak dijumpai kesenjangan digital di lingkup pemerintahan mengenai implementasi *e-government* sehingga dapat memperlambat tujuan dalam penerapan *e-government* terutama di Indonesia.

2.2.2. Konsep Kesenjangan Digital

Menurut Chen dan Wellman, konsep kesenjangan digital adalah kesenjangan dari faktor pengaksesan dan penggunaan internet, yang dibedakan oleh status sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat hidup, etnik, dan lokasi geografi (Wenhong, et al., 2003). Sedangkan Bridges, menilai kesenjangan digital dari jumlah pengguna atau komputer, akses infrastruktur, kemampuan penggunaan, pelatihan, isi yang relevan, sektor teknologi informasi (seberapa besar integrasi sektor TIK pada industri yang ada), kemiskinan, dan batas demografi (geografi, ras, usia, agama, jenis kelamin, dan kecacatan).

Pada konsep Chen dan Wellman didukung juga oleh konsep Choi yang menyatakan bahwa tidak hanya pada kesenjangan akses terhadap TIK namun juga pada kesenjangan kemampuan dalam menggunakan TIK (Choi, et al., 2004).

Berdasarkan Kemly Camacho (Camacho, 2005), konsep kesenjangan

digital fokus pada hal sebagai berikut :

- a. Fokus pada Infrastruktur, yaitu berdasarkan perbedaan antara individu yang memiliki infrastruktur TIK serta koneksi internet dengan individu yang tidak memiliki infrastruktur TIK serta koneksi internet ;
- b. Fokus pada pencapaian kecakapan TIK, yaitu antara individu yang berusaha mencapai kecakapan TIK yang dibutuhkan dengan individu yang tidak memiliki upaya mencapai kecakapan TIK yang dibutuhkan ;
- c. Fokus pada pemanfaatan sumberdaya, yang didasarkan pada keterbatasan individu untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia di website (melalui internet).

2.3. SIBIS (Statistical Indicator Benchmarking the Information Society)

2.3.1. Tujuan dan fokus SIBIS

SIBIS (*Statistical Indicators Benchmarking the Information Society*) merupakan suatu proyek komisi Eropa yang berusaha menganalisis serta membandingkan berbagai indikator-indikator kesenjangan digital yang berbeda (SIBIS, 2003). Proyek dari SIBIS sudah berjalan dari awal bulan januari 2001 hingga bulan September tahun 2003. Adapun tujuan keseluruhan dari SIBIS yaitu mengembangkan indikator-indikator yang digunakan untuk memonitor perkembangan menuju masyarakat informasi (Vehovar, et al., 2006). Dengan berlandaskan pada tujuan tersebut maka SIBIS fokus pada

akses serta pemanfaatan dasar seperti kesiapan internet, kesenjangan digital dan keamanan informasi.

Instrumen SIBIS mengkombinasikan tiga tingkat dasar dalam pengembangan masyarakat informasi yaitu kesiapan, intensitas serta dampaknya (Yulfitri, 2008). Indikator-indikator SIBIS telah diuji serta dilaksanakan survey perbandingan pada 15 anggota Negara bagian, seperti Amerika Serikat, Swiss dan EU Accession countries, Bulgaria, dan Negara bagian yang lain. Pada survey tersebut mengumpulkan serta mempresentasikan data untuk tujuan perbandingan antara negara bagian Eropa. Dan untuk pertama kalinya perbandingan antar Negara yaitu antara Eropa dengan Amerika Serikat dengan menggunakan indikator yang sama persis dan pada saat yang bersamaan (SIBIS, 2003) (SIBIS, 2003). Kelebihan metode SIBIS menurut Barzilai (2006) menyatakan bahwa metode ini memiliki kekurangan dalam hal pengukuran terhadap kesenjangan digital terhadap kesenjangan ekonomi serta sosial (Barzilai-Nahon, 2006).

Banyak variabel yang dapat dipilih dalam kelebihan metode SIBIS adalah sebagai berikut yaitu : (sumber: SIBIS, 2003)

- a. Kesiapan internet;
- b. Kesenjangan digital;
- c. Keamanan informasi;
- d. Tanggapan secepat mungkin
- e. Terhadap akses;
- f. Literasi, pembelajaran serta

- g. Pelatihan digital; E-Commerce, E-Work, E-Science, *E-government* , E-Health.

Manakala kekurangan atau kelemahan dari metode SIBIS (Barzilai-Nahon, 2006) adalah Indikator kesenjangan digital yang kurang menekan pada kesenjangan sosial dan ekonomi

Indikator SIBIS yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesenjangan digital masyarakat di kota pekalongan yaitu perilaku penggunaan internet, kegunaan penggunaan internet, *e-government* dan demografi (SIBIS, 2003). Penjelasan dari masing-masing aspek sebagai berikut:

Perilaku Penggunaan Internet

Dalam penelitian perilaku internet menunjukkan bahwa internet membuat hidup menjadi mudah, dapat berkomunikasi dengan berbagai masyarakat yang berbeda budaya dan pendidikan (Aydin, 2007) (D'Esposito, 1999). Menurut Fallows internet dapat digunakan sebagai tujuan ilmiah, pencaharian tempat, informasi kontak, pembelian produk, berkomunikasi melalui email atau chatting dan sebagai media hiburan seperti permainan atau menonton video dan lain sebagainya (Fallows, 2004).

Perilaku dalam menggunakan internet dapat ditunjukkan dari aspek yang mendukungnya. Djohari membagi aspek-aspek tersebut menjadi tiga, yaitu motif yang menjadi latar belakang penggunaan, durasi penggunaan dan frekuensi penggunaan (Razaq, et al., 2001)

i. Motif Penggunaan Internet

Motif seseorang dalam menggunakan internet dibagi menjadi tiga yaitu motif

hiburan, sosial dan pengetahuan (Andina, 2006). Motif hiburan memungkinkan pengguna untuk mencari kesenangannya di dunia maya misalnya mendengarkan musik dan melihat cuplikan (trailer) film layar lebar.

Motif sosial mengacu pada hubungan sosial. Pengguna dapat mengembangkan pergaulannya tidak hanya dalam satu negara, bahkan di seluruh dunia dengan menggunakan fasilitas e-mail dan chatting di internet. Menurut Hall & Parsons (2001) individu menjadi kecanduan internet lebih kepada alasan social daripada intelektual. Motif pengetahuan mengacu pada kegiatan mencari informasi untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan yang diinginkan atau dibutuhkan pengguna. Adanya search engine (alat pencari halaman web) pengguna dapat mencari berbagai informasi di halaman web manapun.

ii. Durasi Penggunaan Internet

Durasi penggunaan internet mengacu pada lamanya seseorang menggunakan internet. Durasi diduga juga dipengaruhi oleh motif seseorang dalam menggunakan internet, jaringan hubungan internet (internet network), dan biaya penggunaan internet (Andina, 2006)

iii. Frekuensi Penggunaan Internet

Salah satu variabel yang mempengaruhi akses internet adalah frekuensi (Stylianou AC, 2007). Frekuensi mengacu pada pengertian seberapa sering atau berapa kali seseorang menggunakan internet (Horrigan, 2002). Frekuensi terkait dengan penggunaan internet dalam suatu periode tertentu. Tidak begitu berbeda dengan durasi, frekuensi juga diduga dipengaruhi oleh motif

menggunakan internet, jaringan hubungan internet dan biaya penggunaan internet.

Nachmias, Mioduser dan Shemla (2000) dalam penelitiannya menemukan bahwa perbedaan gender (jenis kelamin) dalam penggunaan internet dengan intensitas dan durasi lebih lama yaitu dilakukan oleh laki-laki (Nachmias, 2000).

Kegunaan Penggunaan Internet

Pemanfaatan internet merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna internet dalam melaksanakan tugasnya (Chin, 1995). Pemanfaatan dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu sebagai berikut: (Chin, 1995):

- a. Kemanfaatan meliputi dimensi :
 - i. Menjadikan pekerjaan lebih mudah (*makes job easier*), mudah mempelajari dan mengoperasikan suatu teknologi dalam mengerjakan pekerjaan yang diinginkan oleh seseorang dan dapat memberikan keterampilan agar pekerjaannya lebih mudah.
 - ii. Bermanfaat (*usefull*), suatu tingkatan dimana seseorang percaya bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu terdapat manfaat atau faedah untuk dapat meningkatkan prestasi kerja orang tersebut.
 - iii. Menambah produktifitas (*increase productivity*), merupakan sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan seseorang akan bertambah atau meningkatkan produktifitasnya dalam suatu kegiatan-kegiatan yang dimilikinya agar menjadi lebih baik.

b. Efektifitas meliputi dimensi :

a. Mempertinggi efektifitas (*enchance effectiveness*), bahwa penggunaan suatu teknologi tertentu akan membantu seseorang agar aktifitas sehari-hari menjadi meningkat dalam melakukan suatu pekerjaan.

b. Mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve job performance*), dengan menggunakan suatu teknologi tertentu dapat membantu mengembangkan kinerja pekerjaan seseorang dalam dunia pekerjaan yang dimiliki oleh orang tersebut.

Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu (Sanjaya, 1995)

E-government

Menurut Keppres No. 20 Tahun 2006 *e-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Peranan teknologi informasi dalam proses bisnis membuat organisasi berusaha untuk mengimplementasikan teknologi informasi untuk proses terintegrasi. Menurut Heeks (2001), *e-government* lahir karena revolusi informasi dan revolusi pemerintahan. Pengertian *e-government* menurut Bank Dunia yaitu: “*E-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area*

network, the internet, and mobile computing) that have ability to transform relation with citizens, businesses, and other arms of government” (Indrajit, 2002). Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Bank Dunia adalah e-government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area network, internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan.

Konsep *e-government* merupakan salah satu contoh implementasi praktek e-business dalam bidang pemerintahan. Menurut Gullledge & sommer (2002) perubahan-perubahan yang terjadi dalam filsafat manajemen menyebabkan organisasi sektor publik berpikir dan bertindak seperti organisasi-organisasi sektor privat (Martin, et al., 2006). Tipe penerapan *e-government* menurut Seifert dan Bonham (2003) ada empat antara lain (Bonham, 2003) (Monga, 2008) *government to citizens, government to government, government to bussiness dan government to Employees*. Dalam penelitian ini tipe penerapan yang digunakan yaitu *Government to Citizens* merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk interaksi antara warganegara dengan pemerintahnya. Dimana interaksi ini merupakan tujuan utama dari *e-government* yang memungkinkan warga Negara mendapatkan pelayanan pemerintah dengan nyaman, mudah dan cepat melalui akses akan informasi publik yang disediakan pemerintah dalam situs tertentu, yang dalam batas tertentu diharapkan bisa meningkatkan efisiensi melalui pelayanan satu atap kepada warga Negara.

Demografi

Philip M. Hauser dan Dudley Duncan (1959) mengusulkan definisi demografi sebagai berikut: —*Demographic is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the components of a such changes which maybe identified as natality, territorial movement (migration), and social mobility (changes of states)*”. Dapat juga diartikan demografi mempelajari jumlah, persebaran, territorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak territorial (migrasi) dan mobilitas social (perubahan status).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Husing (2004) bahwa aspek demografi untuk pengukuran kesenjangan seperti umur, jenis kelamin, pendidikan dan penghasilan (Hüsing, 2004). Sedangkan pada penelitian ini yang digunakan dalam aspek demografi yang digunakan yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan